Integritas Pemimpin

Suara Karya Online, Jumat, 5 Februari 2010

Oleh: Nur Syam

Pada era reformasi ini yang tetap menarik untuk dicermati adalah pakta integritas. Pakta yang dimaksud adalah kesepakatan bagi para pejabat atau pemimpin untuk bersikap jujur selama yang bersangkutan memegang jabatan. Integritas berarti kejujuran. Jujur dalam melakukan tindakan terkait dengan jabatan yang disandangnya.

Negeri ini dalam waktu yang cukup lama ditengarai tidak mengutamakan integritas. Terbukti dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hampir semua lini kehidupan mengidap penyakit KKN. Begitu merebaknya KKN, sehingga ada yang menyatakan bahwa KKN sudah menjadi semacam budaya bangsa. Tetapi, yang benar KKN telah menjadi penyakit masyarakat.

Di dalam sejarah kekhalifahan Islam terdapat Khilafah Bani Umayyah yang berkuasa hampir seratus tahun. Sebagaimana sistem kerajaan pada umumnya, khilafah ini juga terkenal karena tindakan KKN-nya. Pengangkatan pejabat dan pegawai didasarkan atas sistem familisme.

Bahkan juga sangat otoriter. Semua yang berbeda dengan negara akan diberangus. Cucu Rasulullah Muhammad SAW juga dibunuh dengan sangat kejam. Semua musuh kerajaan juga dihancurkan sampai ke akar-akarnya.

Namun, pada masa itu juga muncul seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan memiliki integritas yang luar biasa. Dialah Umar ibn Abdul Aziz. Di dalam riwayat dinyatakan bahwa pada suatu malam, sang khalifah dikunjungi salah seorang sahabatnya. Karena bersahabat karib, maka tamu itu ditemui oleh sang khalifah di ruang kerjanya.

Ternyata Khalifah masih bekerja pada malam itu. Setelah berbasa-basi, kemudian sang khalifah bertanya apakah keperluannya. Maka, sahabatnya itu menyatakan bahwa dia ingin mengadukan masalah pribadinya.

Tiba-tiba lampu kerjanya dimatikan. Tentu saja sahabatnya itu menjadi heran dan bertanya kenapa lampunya dimatikan. Maka sang khalifah menjawab, "Karena yang dibicarakan masalah pribadi, maka lampu saya matikan. Lampu ini didanai oleh negara. Jadi, untuk urusan pribadi harus dimatikan."

Dialog imajinatif berbasis sejarah ini memberikan pemahaman kepada kita akan arti pentingnya integritas dalam mengelola pemerintahan. Sebagai seorang khalifah, tentu saja ia memiliki sejumlah privilese. Termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Akan tetapi, semua itu diletakkannya dalam konteks pemilahan urusan pribadi dan negara. Inilah teladan yang sangat baik.

Para pemimpin kita sedang berada di tengah nuansa tudingan yang tidak mengenakkan terkait dengan kasus-kasus besar maupun kecil. Andaikan para pemimpin itu meneladani kepemimpinan dalam memilah "kepentingan negara" dan "kepentingan pribadi" atau "barang milik negara" dan "barang milik pribadi", maka keruwetan di negeri ini akan bisa diselesaikan.

Sayangnya, kesadaran seperti ini masih mengawang (menggantung) di angkasa. Memang perlu waktu dan kita semua harus yakin, pada suatu saat hal itu akan datang juga.***.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id